

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Balap Motor Liar di Kabupaten Pamekasan**

Kegiatan balap motor liar yang cukup marak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh pelaku dari kalangan tertentu. Gambaran mengenai pelaku balap motor liar tersebut diungkapkan oleh pihak Polres Pamekasan dalam petikan wawancara berikut ini.

Para pelaku pada umumnya para remaja.<sup>34</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Para pelaku balap motor liar biasanya melakukan aksinya pada malam hari bahkan dini hari. Para pelaku ini didominasi oleh para remaja SMP dan SMA.<sup>35</sup>

Tidak jauh dengan kedua pendapat di atas, Bapak Sri Sugiarto mengemukakan:

Gambaran pelaku adalah pelajar siswa SMP, SMA dan siswa putus sekolah.<sup>36</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaku balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan umumnya adalah remaja, baik remaja yang masih bersekolah di bangku SLTP dan SLTA maupun yang sudah tidak bersekolah lagi (remaja putus sekolah). Artinya bahwa para

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

pelaku balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan umumnya berusia antara 13-18 tahun. Aksi atau aktivitas balap motor liar tersebut biasanya dilakukan di malam hari, bahkan hingga dini hari.

Para pelaku balap motor liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan tersebut memiliki motif yang hampir sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polres Pamekasan dalam petikan wawancara berikut ini.

Motif pelaku balap motor liar hanya sebagai hiburan dan hobi saja.<sup>37</sup>

Pendapat tersebut di atas dilengkapi dengan yang dikemukakan oleh Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Motif pelaku balapan biasanya karena hanya ingin menunjukkan eksistensinya.<sup>38</sup>

Jawaban yang juga bersifat melengkapi kedua pendapat di atas dikemukakan oleh Bapak Sri Sugiarto yaitu:

Balap motor liar hanya digunakan sebagai mengisi waktu luang.<sup>39</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa motif pelaku melakukan aksi balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan antara lain untuk menyalurkan hobi dan eksistensi mereka sebagai pencinta olahraga balap motor, serta untuk mengisi waktu luang mereka dengan melakukan aksi tersebut sebagai suatu hiburan tersendiri. Artinya bahwa aktivitas balap motor

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

liar yang cukup marak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan adalah para remaja yang memiliki kegemaran atau hobi balap motor yang berupaya menunjukkan keberadaan atau eksistensi mereka kepada masyarakat dengan menyelenggarakan hiburan gratis di waktu luang di jalanan.

Aktivitas balap motor liar di kalangan remaja tentu tidak muncul begitu saja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang memicu timbulnya hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polres Pamekasan dalam petikan wawancara berikut ini.

Faktor penyebab balap motor liar adalah tidak adanya sirkuit balap resmi di Kota Pamekasan untuk menampung kegiatan remaja yang mempunyai hobi balap motor, dan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya remaja pencinta balap motor akan peraturan lalulintas serta pengawasan orang tua kurang.<sup>40</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Adanya pengaruh pergaulan, kurangnya perhatian dari orang tua, dan tidak adanya lahan sirkuit.<sup>41</sup>

Tidak jauh dengan kedua pendapat di atas, Bapak Sri Sugiarto mengemukakan:

Tidak adanya kesadaran diri dari pelaku balap motor liar tersebut, dan tidak adanya lahan yang digunakan untuk balapan.<sup>42</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kalangan remaja melakukan aktivitas balap motor liar di

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

wilayah hukum Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan keterangan dari pihak Polres Pamekasan tersebut maka diketahui terdapat empat faktor yang menyebabkan remaja melakukan aktivitas balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, yaitu tidak adanya sarana untuk melakukan balap motor resmi (sirkuit), kurangnya kesadaran remaja pelaku balap motor liar akan peraturan lalulintas, adanya pengaruh pergaulan dari teman pelaku balap motor liar, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap remaja pelaku balap motor liar.

**B. Tindakan Preventif dan Represif Sat Lantas Polres Pamekasan Terhadap Pelanggaran Dalam Balap Motor Liar di Kabupaten Pamekasan**

Sebagai pihak aparaturnegara penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan, Polres Pamekasan tidak tinggal diam atau membiarkan terjadinya beberapa pelanggaran dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar yang terjadi di wilayah hukum mereka. Polres Pamekasan, khususnya Sat Lantas telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif dalam mencegah dan menindak berbagai pelanggaran dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar tersebut.

**1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah upaya pencegahan agar suatu kejahatan tidak terjadi. Berbagai bentuk tindakan preventif tersebut dikemukakan oleh pihak Sat Lantas Polres Pamekasan, sebagaimana dalam penuturan Ibu Nuning Dyah P. S., sebagai berikut:

Memberikan sosialisasi di sekolah dan klub atau komunitas motor yang ada di Pamekasan, himbauan pada saat dialog interaktif di

radio-radio, penggelaran kekuatan (menggelar anggota polisi dengan mobilnya di lokasi balap motor liar).<sup>43</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Mengadakan sosialisasi, memberikan hukuman bagi yang melanggar, mengadakan patroli.<sup>44</sup>

Tidak jauh dengan kedua pendapat di atas, Bapak Sri Sugiarto mengemukakan:

Memberikan sosialisasi di masyarakat, melakukan patroli pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi balap motor liar.<sup>45</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk tindakan preventif yang oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, yaitu melakukan sosialisasi dan himbauan di sekolah dan masyarakat luas, dan melakukan patroli di berbagai lokasi yang rawan terjadi balap motor liar.

a. Sosialisasi dan himbauan kepada kelompok sasaran di masyarakat

Sosialisasi dalam hal ini adalah proses memberitahukan dan menanamkan tentang bahaya dan larangan melakukan balap motor liar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kelompok sasaran di berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan kepada para pelajar di

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

berbagai sekolah dan kepada para anggota klub atau komunitas motor yang ada di Kabupaten Pamekasan, serta di radio-radio.

#### 1) Sosialisasi dan himbauan kepada para pelajar di sekolah

Sosialisasi tentang balap motor liar dilakukan di berbagai sekolah dikarenakan para pelaku balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan umumnya adalah remaja, baik remaja yang masih bersekolah di bangku SLTP dan SLTA maupun yang sudah tidak bersekolah lagi (remaja putus sekolah). Artinya bahwa para pelaku balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan umumnya berusia antara 13-18 tahun.<sup>46</sup>

Gambar 1  
Sosialisasi Tentang Balap Motor Liar di Sekolah



Sumber: Dokumentasi Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

<sup>46</sup> Wawancara dengan ketiga responden Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Februari 2017 di Mapolres Pamekasan.

Kegiatan yang unik dalam sosialisasi kepada para pelajar di sekolah adalah pihak dari Sat Lantas Polres Pamekasan menjadi pembina upacara setiap hari Senin pada semua sekolah di wilayah Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini, pihak Sat Lantas Polres Pamekasan sebagai Pembina Upacara dalam menyampaikan tentang larangan dan bahaya kegiatan balap motor liar yang pelakunya kebanyakan remaja.

Gambar 2  
Sat Lantas Polres Pamekasan Menjadi Pembina Upacara di Sekolah



Sumber: Dokumentasi Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

Selain melakukan sosialisasi, Sat Lantas Polres Pamekasan memberikan himbauan, yang dalam hal ini adalah mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan balap motor liar dan selalu mematuhi peraturan atau tata tertib berlalu lintas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai media, baik cetak (spanduk) dan elektronik (radio, sosial media), agar tidak melakukan kegiatan yang cenderung merugikan masyarakat tersebut.



## 2) Sosialisasi dan himbauan kepada para anggota klub motor

Sosialisasi dan himbauan tentang larangan dan bahaya kegiatan balap motor liar juga dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan dengan para anggota klub atau komunitas motor yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hal ini dimaksudkan agar klub dan komunitas motor dapat melarang dan menghimbau para anggotanya untuk tidak melakukan aktivitas balap motor liar yang dapat mengancam keselamatan para pengendara lain di jalanan.

Gambar 3  
Sosialisasi Tentang Balap Motor Liar dengan Klub Motor



Sumber: Dokumentasi Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

## 3) Sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat luas melalui radio

Di radio, Polres Malang secara rutin melakukan dialog interaktif (*talkshow*) melalui siaran *on air* di berbagai radio di Kabupaten Pamekasan sebagai media sosialisasi dan himbauan agar



masyarakat tertib berlalu lintas. Radio-radio tersebut di antaranya Karimata FM, Ada FM, Ralita FM, Madura FM, dan Suara Pamekasan, dengan jadwal siaran yang bervariasi, mulai dari pukul 07.00 dengan durasi siaran masing-masing selama satu jam.

Gambar 4  
Dialog Interaktif Polres Pamekasan dalam Siaran Radio



Sumber: Dokumentasi Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

Tabel 1  
Jadwal Rutin Siaran Interaktif (*Talkshow*) di Radio Polres Pamekasan

No.	Hari	Jam Siaran	Lokasi	Frekuensi
1	Senin	09.00 – 10.00 WIB	Karimata FM	103,3 Mhz
2	Selasa	08.00 – 09.00 WIB	Ada FM	125,5 Mhz
3	Rabu	09.00 – 10.00 WIB	Ralita FM	98,1 Mhz
4	Kamis	07.00 – 08.00 WIB	Madura FM	95,8 Mhz
5	Jumat	07.00 – 08.00 WIB	Suara Pamekasan	96,6 Mhz

Sumber: Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

Upaya preventif berupa sosialisasi dan himbauan kepada kelompok sasaran di masyarakat dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang peraturan berlalu lintas. Hal

ini dikarenakan salah satu penyebab munculnya kegiatan balap motor liar di Pamekasan adalah kurangnya kesadaran remaja pelaku balap motor liar akan peraturan lalu lintas.<sup>47</sup>

Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya. Remaja pelaku balap motor liar yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di jalan umum, tanpa mengindahkan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran mereka dalam mematuhi peraturan berlalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto<sup>48</sup> bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa balap motor liar merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 115 huruf b yang menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan ketiga responden Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 53

di jalan dilarang ”berbalapan dengan kendaraan bermotor lain” dan berdasarkan Pasal 297 bahwa ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Pasal 115 huruf b *juncto* Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar terkait dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Sementara Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan pada sepeda motor yang digunakan.

b. Patroli di berbagai lokasi yang rawan terjadi balap motor liar

Patroli dalam hal ini adalah tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara perondaan dimana anggota Sat Lantas Polres Pamekasan bergerak dari satu lokasi yang rawan terjadi balap motor liar ke lokasi lainnya untuk memeriksa dan memastikan lokasi tersebut tidak terdapat aktivitas balap motor liar. Patroli yang rutin dilakukan salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya balap motor liar yang bisa membahayakan pengendara dan masyarakat. Dengan diadakannya patroli maka dapat membantu mencegah kegiatan balap motor liar yang meresahkan masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat melintas di jalan umum yang sering dijadikan lokasi balap motor liar. Dalam pelaksanaan patroli yang bersifat dialogis, personil Sat Lantas Polres Pamekasan juga menghimbau kepada para remaja agar jangan sampai mengikuti balap motor liar karena dapat mengganggu pengguna jalan umum lainnya.

Balapan motor liar dilakukan di sejumlah lokasi. Di wilayah perkotaan yaitu di Jalan Kabupaten, Jalan Trunojoyo, Jalan Jokotole, dan Jalan Raya Panglegur. Di Kecamatan Pademawu, balap motor liar kerap dilakukan anak-anak muda di Jalan Tambung. Lokasi yang juga kerap digunakan melakukan balap motor liar di antaranya Dusun Asem Manis Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan. Juga jalan

kabupaten di Kelurahan Jungcang dan Desa Jalmak Kecamatan Kota Pamekasan.

Kedua tindakan preventif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, yaitu sosialisasi dan himbauan kepada kelompok sasaran di masyarakat, dan patroli di berbagai lokasi yang rawan terjadi balap motor liar, pada dasarnya bagian dari politik kriminal di luar hukum pidana (sarana non penal) yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas dalam kegiatan balap motor liar. Sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto,<sup>49</sup> bahwa tindakan preventif merupakan usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha

---

<sup>49</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana).

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan tersebut juga sesuai dengan tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan tindakan preventif Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan juga tercermin dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a sampai f yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

## 2. Tindakan Refresif

Selain tindakan preventif, Sat Lantas Polres Pamekasan juga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya represif terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan. Tindakan represif adalah upaya penindakan terhadap suatu kejahatan yang sedang atau telah terjadi. Berbagai bentuk tindakan represif tersebut dikemukakan oleh pihak Sat Lantas Polres Pamekasan, sebagaimana dalam penuturan Ibu Nuning Dyah P. S., sebagai berikut:

Melaksanakan penggerebekan di lokasi, penindakan dengan tilang serta memanggil orang tua pelanggar, melaksanakan razia di dekat atau di lokasi balap motor liar.<sup>50</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Melakukan razia di lokasi balap motor liar, melakukan penangkapan dan menindaklanjuti dengan menilang pelaku balap motor liar tersebut.<sup>51</sup>

Tidak jauh dengan kedua pendapat di atas, Bapak Sri Sugiarto mengemukakan:

Melakukan razia di tempat-tempat yang rawan terjadi balap motor liar, melakukan penindakan dan memberikan sanksi kepada pelaku balap motor liar tersebut.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.



Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk tindakan represif yang oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, yaitu melakukan razia atau penggerebekan di lokasi balap motor liar dan memberikan tilang pada sepeda motor yang digunakan dalam aktivitas balap motor liar.

a. Razia dan penggerebekan di lokasi balap motor liar

Razia balap motor liar dalam hal ini adalah kegiatan pemeriksaan, penggerebekan, dan penangkapan secara beramai-ramai oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap para pelanggar hukum yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan. Razia yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah Pamekasan. Terutama untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sekaligus penertiban terhadap adanya balap motor liar atau kebut-kebutan di lokasi-lokasi yang dirazia tersebut.

Dalam upaya memerangi balap motor liar di wilayahnya, Polres Pamekasan menurunkan personel Sat Lantas, Sabhara, dan Sat Reskrim untuk melakukan razia balapan motor liar sejak pukul 02.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB, sebab masyarakat merasa terganggu dan takut keluar rumah karena aksi balap motor liar yang terjadi dapat berlangsung hingga pukul 05.00 WIB. Razia yang dilakukan ketiga satuan Polres Pamekasan tersebut bertujuan untuk menekan aksi balap

motor liar yang selama ini meresahkan masyarakat, dan razia tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Razia balap motor liar biasanya dilakukan oleh Polres Pamekasan setiap Minggu dini hari. Namun razia dilakukan terkadang tidak membuat pelaku balap motor liar tersebut jera. Mereka masih tetap berani menggelar balap motor liar saat malam sabtu dan malam minggu secara sembunyi-sembunyi saat tidak ada petugas dengan lokasi yang berpindah-pindah. Pada malam Minggu tersebut memang biasanya banyak aksi balap motor liar yang dilakukan oleh para pemuda dan pelajar di Kabupaten Pamekasan.

Gambar 5  
Operasi Malam Mingguan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan



Sumber: Dokumentasi Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

Dalam razia atau penggerebekan balap motor liar tersebut, Polres Pamekasan melakukan proses penangkapan dan penahanan terhadap

para pelaku yang diduga terlibat aksi balap motor liar yang tengah terjadi. Namun hampir semua pelaku adalah remaja baik yang masih berstatus pelajar maupun remaja putus sekolah. Polres Pamekasan dalam hal ini menerapkan proses non penal kepada remaja pelaku balap motor liar tersebut dengan memanggil orang tua atau wali dari remaja tersebut untuk diajak berdialog dan kemudian remaja tersebut dilepaskan kembali kepada orang tua atau walinya tersebut.

b. Memberikan tilang pada sepeda motor yang terlibat balap motor liar

Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran, dan pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran lalu lintas. Fungsi tilang sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh Polantas dari Pelanggar.

Tabel 2  
Data Jumlah Tilang Balap Motor Liar Tahun Sat Lantas Polres  
Pamekasan  
Tahun 2013 – 2016

No.	Tahun	Jumlah Tilang Motor Hasil Razia Balap Motor Liar
1.	2013	238 unit
2.	2014	198 unit
3.	2015	180 unit
4.	2016	177 unit

Sumber: Dokumen Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

Tilang diberikan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan kepada masing-masing pemilik sepeda motor atas pelanggaran lalu lintas yang

berbeda-beda seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa atau memiliki SIM dan STNK, dan ketidaksesuaian surat-surat kendaraan dengan spesifikasi sepeda motor. Jumlah sepeda motor yang ditilang tersebut bisa mencapai 70 puluhan unit yang berhasil diamankan dalam razia balap motor liar yang telah dilakukan oleh Polres Pamekasan.

Gambar 6  
Barang Bukti Hasil Operasi Antisipasi Balap Motor Liar



Sumber: Dokumentasi Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017

Sepeda motor yang terkena tilang dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah menjalani sidang pada waktu yang telah ditentukan. Namun terhadap motor yang terlibat balap motor liar dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Motor-motor yang tidak disertai surat resmi akan ditelusuri lebih lanjut. Hal itu untuk memastikan motor tersebut bukan

hasil curian. Biasanya motor yang bermasalah jarang diambil oleh pemiliknya di Polres Pamekasan.

Kedua tindakan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, yaitu razia dan penggerebekan di lokasi balap motor liar, dan memberikan tilang pada sepeda motor yang terlibat balap motor liar, pada dasarnya bagian dari politik kriminal melalui hukum pidana (sarana penal) yang bertujuan untuk menindak pelanggaran lalu lintas dalam kegiatan balap motor liar. Sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto,<sup>53</sup> bahwa tindakan represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan tersebut juga sesuai dengan tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian

---

<sup>53</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

Negara RI adalah menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tindakan represif Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan juga tercermin dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g sampai l yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan dan analisa data sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Sat Lantas Polres Pamekasan melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan.

Tabel 3

Tindakan Preventif dan Represif Sat Lantas Polres Pamekasan Terhadap  
Pelanggaran Dalam Balap Motor Liar di Kabupaten Pamekasan

No.	Jenis Tindakan	Bentuk Tindakan
1.	Preventif (pencegahan)	b. Sosialisasi dan himbauan kepada kelompok sasaran di masyarakat. c. Patroli di berbagai lokasi yang rawan terjadi balap motor liar.
2.	Represif (penindakan)	a. Razia atau penggerebekan di lokasi balap motor liar. b. Memberikan tilang pada sepeda motor yang terlibat balap motor liar.

Sumber: Hasil wawancara dengan Sat Lantas Polres Pamekasan, 2017.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang dapat merusak ataupun merugikan masyarakat dan negara. Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Tindakan mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>54</sup> Oleh karena itu, tindakan preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana (*non-penal*).

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan dalam bentuk melakukan sosialisasi dan himbauan kepada kelompok sasaran di

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hal. 66.



masyarakat, dan melakukan patroli di berbagai lokasi yang rawan terjadi balap motor liar. Adapun tindakan represif atau yang sering disebut upaya *penal*, dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku balap motor liar khususnya di wilayah hukum Polres Pamekasan. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>55</sup> Tindakan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan adalah dengan melakukan razia atau penggerebekan di lokasi balap motor liar, dan memberikan tilang pada sepeda motor yang terlibat balap motor liar.

Melalui berbagai bentuk tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan tersebut maka aktivitas balap motor liar di Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, agar tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar dapat berjalan lancar dan efektif, maka dibutuhkan sinergi yang konsisten antara

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 79.

pihak Polres Pamekasan dengan instansi lain yang terkait seperti lembaga pendidikan (sekolah dan pondok pesantren), Provost Polri, Subden POM, stasiun radio, dan sebagainya. Semakin efektif tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres Pamekasan bersama dengan pihak-pihak tersebut maka diharapkan semakin menurun pula intensitas aksi balap motor liar, dan pada akhirnya akan diperoleh keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat yang mengalami keresahan akibat maraknya aksi balap motor liar yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat berpotensi membahayakan keselamatan jiwa pelaku dan pengguna jalan lainnya di wilayah Kabupaten Pamekasan selama ini.

**C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Sat Lantas Polres Pamekasan Pada Tindakan Preventif dan Represif Terhadap Pelanggaran Dalam Balap Motor Liar di Kabupaten Pamekasan Serta Solusinya**

Tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran dari tindakan preventif dan represif tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi Sat Lantas Polres Pamekasan pada tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan dikemukakan oleh pihak Sat Lantas Polres Pamekasan, sebagaimana dalam penuturan Ibu Nining Dyah P.S. sebagai berikut:

Selama ini berjalan lancar dan tidak ada kendala.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

Namun pendapat Ibu Nuning Dyah P. S. di atas berbeda dengan pendapat Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Kendalanya adalah karena aparat Kepolisian di Pamekasan terbatas, maka penindakan yang dilakukan kurang maksimal yang dibuktikan dengan berpindah-pindahnya pelaku balap motor liar tersebut.<sup>57</sup>

Pendapat Ibu Yunita R. di atas hampir sama dengan pendapat Bapak Sri Sugiarto yang mengemukakan:

Pelaku balap motor liar yang berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dan kurangnya personil kepolisian.<sup>58</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat dua faktor kendala yang dihadapi Sat Lantas Polres Pamekasan pada tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, yaitu pelaku seringkali berpindah lokasi dalam melakukan aksi balap motor liar dan terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang melakukan penindakan terhadap aksi balap motor liar.

#### 1. Pelaku seringkali berpindah lokasi dalam melakukan aksi balap motor liar

Meski berulang kali ditertibkan aparat Sat Lantas Polres Pamekasan, aksi *trek-trekan* alias balap motor liar masih saja terus berlangsung. Bahkan untuk menghindari razia petugas, para pelaku rela berpindah lokasi untuk menyalurkan aksinya. Sejumlah pelaku melakukan perpindahan aksi balap motor liar dikarenakan menghindari razia pihak kepolisian. Waktunya juga terkadang berubah dari yang biasanya dilakukan pada malam hari, terkadang dilakukan pada siang hari.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

Para pelaku cukup pintar dan berpengalaman dalam melihat kondisi dan terus memantau pihak kepolisian. Jika aparat kepolisian melakukan patroli, maka mereka sering menghilang dari peredaran. Namun setelah aparat tidak ada di lapangan, maka mereka kembali berkumpul. Akibatnya, antara aparat polisi dan para pelaku balap motor liar itu sering terjadi aksi kucing-kucingan. Mereka sering kali berpindah-pindah tempat saat menjalankan aksi. Hal itu tentunya sangat menyulitkan aparat polisi dalam menertibkan mereka.

Gambar 7  
Jalan Trunojoyo, Salah Satu Lokasi Favorit Balap Motor Liar



Sumber: [www.rimanews.com](http://www.rimanews.com)<sup>59</sup>

Solusi atas kendala pertama ini menurut hemat penulis adalah dengan cara meningkatkan intensitas patroli ke jalan-jalan umum yang sering dan berpotensi menjadi lokasi balap motor liar. Selain itu, Polres Pamekasan perlu memberikan menghimbau secara gencar kepada

<sup>59</sup> Rimanews, 27 September 2015, *TNI-Polri Tertibkan Balap Motor Liar Sekelompok Pemuda di Pamekasan*, <http://rimanews.com/nasional/peristiwa/read/20150927/236416/TNI-Polri-Tertibkan-Balap-Liar-Sekelompok-Pemuda-di-Pamekasan>

masyarakat luas agar jika masyarakat mengetahui adanya kejadian atau aksi balap motor liar, maka diminta untuk segera melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.

2. Terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang melakukan penindakan terhadap aksi balap motor liar

Kendala ini menunjukkan bahwa Polres Pamekasan membutuhkan tambahan personel agar dapat menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan. Idealnya jumlah polisi dibandingkan masyarakat adalah 1 : 350. Namun, perbandingannya di Indonesia saat ini adalah sekitar 1 : 575. Artinya bahwa 1 orang Polisi harus mampu menjaga sebanyak 575 orang warga. Angka perbandingan ini tentu saja masih jauh dari angka yang ideal. Kondisi yang sama terjadi juga di Polres Kabupaten Pamekasan yang memiliki rasio 1 : 600, dimana hal ini menunjukkan bahwa Polres Pamekasan secara umum mengalami kekurangan personel polisi, khususnya personel Sat Lantas.

Dalam proses represif (penindakan) di lapangan seperti razia dan penggerebekan aksi balap motor liar, tidak semua pelaku dapat ditangkap mengingat banyaknya masyarakat yang turut menonton aksi balap motor liar. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak personel kepolisian dalam proses penindakan di lapangan agar dapat menangkap seluruh pelaku yang terlibat aksi balap motor liar tersebut.

Solusi atas kendala kedua ini menurut hemat penulis adalah menambah kerjasama dengan instansi lain yang terkait guna menambah

jumlah personel dalam proses penindakan. Misalnya bekerjasama dengan TNI, Sat Pol PP, Banser, dan instansi lainnya yang dapat memberikan bantuan sejumlah personel untuk bergabung dan menambah personel dari Polres Pamekasan, khususnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penindakan seperti razia atau penggerebekan di berbagai lokasi balap motor liar di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor kendala yang dihadapi oleh Sat Lantas Polres Pamekasan pada tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan. *Pertama*, pelaku sering berpindah-pindah lokasi dalam melakukan aksi balap motor liar. Faktor ini dapat menyulitkan pihak Sat Lantas Polres Pamekasan dalam mencegah terjadinya aksi balap motor liar di masyarakat. *Kedua*, terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang melakukan penindakan aksi balap motor liar. Faktor ini dapat menghambat tindakan represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pamekasan sehingga tidak semua pelaku aksi balap motor liar dapat ditangkap di lokasi. Selain itu pelanggaran dalam balapan motor liar di kabupaten pamekasan di sebabkan oleh:

1. Tidak adanya sarana untuk melakukan balap motor resmi (sirkuit)

*Circuit Racing* atau balap sirkuit yaitu dimana motor-motor balap yang dirancang khusus atau motor-motor produksi massal yang dimodifikasi bersaing satu dengan lainnya di sirkuit yang juga dirancang khusus. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memiliki

sarana prasarana olahraga berupa lapangan sirkuit untuk balap motor. Padahal jika seandainya tersedia lapangan sirkuit balap motor dengan penyelenggaraan even-even balap motor yang marak, maka tentu dapat menarik perhatian para remaja pelaku balap motor liar untuk lebih memilih melakukan balap motor yang resmi di lapangan sirkuit. Tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat menyebabkan para remaja memilih melakukan aksi balap motor liar di jalan umum.

Selama ini balap motor liar biasanya dilakukan di jalan-jalan sepi dan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda ketika balap motor digelar di sirkuit resmi, dimana keamanan lebih mudah dipantau. Apalagi kalau pemerintah bisa menyediakan tempat latihan sendiri. Jalan raya yang mulai lengang dijadikan ajang *nge-track*. Sekitar puluhan orang yang kebanyakan remaja sudah menguasai jalan. Pembalap motor liar tak mau tahu, jalan raya yang juga digunakan oleh pengguna jalan lain seolah menjadi sirkuit kelas dunia bagi mereka.

Pada dasarnya di Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memiliki sirkuit baru di kawasan Stadion Ratu Pamelangan yang terletak di Desa Ceguk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Namun di kawasan Stadion tersebut sudah disurvei dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur ternyata sangat tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Balap Motor IMI Jatim pada tahun 2017, baik kualitas aspal, trek lurus nya kurang panjang juga prasarana lain seperti letak



*paddock* dan lahan parkirnya kurang besar dan kurang luas.<sup>60</sup> Dalam hal ini, semua pihak tentu berharap agar Pemerintah Kabupaten dapat segera membenahi sirkuit tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sirkuit tersebut memenuhi kelayakan untuk menjadi tempat latihan dan ajang kejuaraan balap motor, sehingga dapat membantu mengurangi aksi balap motor liar yang masih marak terjadi di Kabupaten Pamekasan.

## 2. Kurangnya kesadaran remaja pelaku balap motor liar akan peraturan lalu lintas

Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya. Remaja pelaku balap motor liar yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di jalan umum, tanpa mengindahkan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran mereka dalam mematuhi peraturan berlalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto<sup>61</sup> bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

<sup>60</sup> Otomotif Zone. 7 Pebruari 2017. *Kejurda Balap Motor IMI Jatim Seri 1 Pamekasan: Pertegas Regulasi 2017*, <http://www.otomotifzone.com/2017/02/07/kejurda-balap-motor-imi-jatim-seri-1-pamekasan-pertegas-regulasi-2017/>

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 53

Terdapat beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas. *Pertama*, minimnya pengetahuan terhadap Tertib Lalu Lintas. Banyak remaja bisa mengendarai motor tetapi tidak tahu mengendarai motor yang benar dan baik seperti peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Dimana jika mereka ingin memperoleh SIM maka harus mengikuti tes yang di selenggarakan oleh kepolisian namun banyak remaja yang memilih jalan pintas, asal cepat dapat, yaitu dengan menembak atau cara-cara illegal lainnya. Sehingga kemampuan mereka dalam berkendara menjadi pertanyaan. Bahwasannya, SIM adalah kompetensi bukan sebuah syarat. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki kesadaran rasa ingin tahu terhadap peraturan lalu lintas dan cenderung apatis sehingga melanggar peraturan. *Kedua*, kebiasaan melihat pelanggaran dan tidak ada arahan dari orang tua. Kondisi inilah yang sangat mencemaskan, dimana orang tua lah fasilitator pertama dalam perkembangan mental spiritual anak. Saat mereka kecil, mereka sudah melihat orang tuanya melanggar peraturan atau melihat orang lain melanggar peraturan dan tidak ada pengarahan dari orang tua mereka.

*Ketiga*, kelengkapan berkendara hanya sebagai formalitas. Memakai kelengkapan bersepeda motor hanya karena ada operasi gabungan bukan kesadaran dari dalam diri sendiri itu adalah alat penyelamat mereka dalam berkendara. *Keempat*, tidak memiliki pandangan ke depan. Banyak remaja yang masa bodoh dengan peraturan yang telah ditegakkan karena mereka hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan sesaat, seperti sikap

hedonisme. Mereka tidak memikirkan hal-hal fatal akibat pelanggaran tersebut dan tidak memiliki visi ke depan akan motivasi mewujudkan perubahan dimulai dari diri sendiri yang dapat membawa perubahan untuk bangsa dan negaranya.

3. Adanya pengaruh pergaulan dengan teman pelaku balap motor liar lainnya

Teman bergaul mempunyai pengaruh yang besar terhadap diri seseorang. Kalau seseorang berteman dengan teman-teman yang jelek, maka hal ini akan berpengaruh terhadap dirinya. Pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan balap motor liar di Kabupaten Pamekasan. Pengaruh yang berasal dari teman biasanya berawal dari ajakan teman yang sudah biasa berpartisipasi dalam balap motor liar, kemudian menyaksikan secara langsung aksi balapan tersebut dan selanjutnya ikut-ikutan tertarik untuk mencobanya.

Meski berisiko tinggi, aksi balap motor liar di berbagai tempat masih saja terjadi. Para pelaku balap motor liar melakukannya hanya mengedepankan ego atau darah muda yang selalu ingin mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari teman pergaulannya. Pengaruh pergaulan yang didasari remaja yang tertarik oleh balap motor liar menunjukkan “keberanian” mereka itu sendiri. Tentu hadiahnya adalah “kebanggaan” di antara sesama pelaku balap motor itu sendiri, bukan apresiasi dari masyarakat sekitar.

#### 4. Kurangnya perhatian orang tua terhadap remaja pelaku balap motor liar

Kurangnya perhatian orang tua juga dapat menjadi faktor pendorong remaja melakukan aktivitas negatif seperti balap motor liar. Menurut Hurlock<sup>62</sup> bahwa perhatian orang tua memiliki peranan penting dalam penyesuaian mental dalam membentuk sikap, nilai, dan minat baru remaja. Remaja dalam pembentukan sikap, nilai, dan minat baru membutuhkan perhatian dari orang tua.

Perhatian orang tua memiliki pengaruh besar dalam penyimpangan perilaku remaja seperti balap motor liar. Balap motor liar yang dilakukan remaja sebagai akibat dari perhatian orang tua yang kurang. Remaja mencari figur perhatian di lingkungan luar dengan cara ikut melakukan apa yang dilakukan temannya, agar memperoleh perhatian dari teman sebayanya. Balap motor liar juga disebabkan oleh perhatian orang tua yang berlebihan, dengan menuruti segala keinginan remaja tanpa memikirkan dari keinginan yang dilakukan remaja tersebut. Kesibukan orang tua membuat kurangnya kebersamaan antara orang tua dan remaja, sehingga remaja merasa kesepian tanpa ada yang memperhatikan dirinya. Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa pengganti ungkapan kasih sayang, serta perhatian mereka lebih baik dalam bentuk materi dari pada kejiwaan (psikologis). Kesalahan orang tua dalam hal ini yang memicu kenakalan pada remaja, salah satunya ialah kebut-kebutan di jalan raya atau balap motor liar.

---

<sup>62</sup> Elizabeth B. Hurlock. 2002. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Ruang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

Aktivitas balap motor liar yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Dampak mengenai aktivitas tersebut disampaikan oleh pihak Polres Pamekasan dalam petikan wawancara berikut ini.

Dampak balap motor liar bagi pelaku adalah balap motor liar sering dilakukan saat malam hari, sehingga mereka tidak tidur akhirnya mereka mengantuk di sekolah dan bolos.<sup>63</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Yunita R., yang menyatakan:

Dampak bagi pelaku: menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pergaulan bebas, miras dan narkoba, dan sebagainya. Dampak bagi keluarga: *image* keluarga di mata masyarakat kurang baik. Dampak bagi masyarakat: menimbulkan keresahan pada masyarakat.<sup>64</sup>

Tidak jauh dengan kedua pendapat di atas, Bapak Sri Sugiarto mengemukakan:

Dampak bagi pelaku: mudahnya terpengaruh pergaulan bebas dan dapat memicu melakukan tindakan yang tidak sesuai norma. Dampak bagi keluarga: kurangnya kedekatan di dalam keluarga. Dampak bagi masyarakat: menimbulkan kerusuhan antara warga dengan pelaku balap motor liar.<sup>65</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak balap motor liar bagi pelaku di antaranya adalah tidak dapat berkonsentrasi saat belajar di sekolah, mudah terpengaruh pergaulan bebas, dapat memicu melakukan tindakan yang tidak sesuai norma. Adapun dampak balap motor liar bagi

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

keluarga di antaranya adalah citra (*image*) keluarga di mata masyarakat kurang baik dan kurangnya kedekatan pelaku di dalam keluarga. Sementara dampak balap motor liar bagi masyarakat di antaranya adalah dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat dan kerusuhan antara masyarakat yang resah tersebut dengan pelaku balap motor liar.

Para pelaku balap motor liar di Kabupaten Pamekasan didominasi oleh kalangan remaja yang masih bersekolah. Mereka seharusnya melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luang mereka, apalagi balapan yang mereka dilakukan pada tengah malam yang seharusnya mereka menyiapkan diri belajar untuk esok harinya. Malah yang terjadi keesokan harinya adalah mereka sering menjadi malas untuk berangkat ke sekolah karena masih mengantuk sehingga cenderung untuk membolos. Kemudian yang terjadi adalah orang tua harus berurusan dengan pihak sekolah, karena remaja anak-anak yang sering bolos sekolah. Hal ini akan berdampak tidak baik untuk hubungan antara orang tua dan anak. Jika hal tersebut terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya.

Terdapat indikasi beberapa pelanggaran hukum yang ada di dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana dikemukakan oleh pihak Polres Pamekasan dalam petikan wawancara berikut ini.

Pasal 115 huruf b, Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b (berbalapan dengan kendaraan lain di jalan), Pasal 285 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.<sup>66</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Yunita R. dan Bapak Sri Sugiarto, yang menyatakan:

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf b, Pasal 287, Pasal 297.<sup>67 68</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa balap motor liar merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan undang-undang tersebut dan hasil wawancara menunjukkan terdapat dua bentuk pelanggaran lalu lintas yang terkait dengan kegiatan balap motor liar di jalan, yaitu;

Pasal 115 huruf b yang berbunyi:

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang “berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.

Pasal 115 huruf b tersebut menunjukkan bentuk pelanggaran hukum dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar terkait dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan tentu dilakukan oleh para pelaku balap motor liar yang berbalapan dengan lawannya yang juga mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dalam kegiatan balap motor liar yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Nining Dyah P. S., IPTU Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Yunita R., Brigadir Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Sugiarto, IPDA Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Pamekasan, tanggal 8 Pebruari 2017 di Mapolres Pamekasan.



Adapun Pasal 297 yang berbunyi:

”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 297 merupakan *juncto* dari Pasal 115 huruf b yang menunjukkan besarnya sanksi pidana bagi pelanggaran lalu lintas khususnya pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melakukan kegiatan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Bentuk pelanggaran yang kedua dalam tindakan balap motor liar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 106 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”.

Adapun Pasal 48 ayat (2) berbunyi:

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;

- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor”.

Sedangkan Pasal 48 ayat (3) berbunyi:

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam aktivitas atau tindakan balap motor liar terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan pada sepeda motor yang digunakan. Para pelaku balap motor liar di Kabupaten Pamekasan pada umumnya menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau “*dipreteli*” dengan merubah rancangan teknis kendaraan yang dipakai agar dapat melaju lebih kencang dan menimbulkan suara yang bising yang memekakkan telinga, sehingga memenuhi unsur pelanggaran terkait ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 tersebut. Pasal 285 ayat (1) juga menyebutkan

besarnya sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terkait dengan ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan tersebut.

